



LAPORAN TAHUNAN



PT.BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI.

2024

Daftar isi

01

Kata Pengantar

02

Kepengurusan

03

Kepemilikan

04

Perkembangan Usaha BPR

05

Strategi dan Kebijakan
Manajemen

06

Perkembangan Target Pasar

07

Laporan Keuangan Tahunan

08

Laporan dan Opini
Akuntan Publik





KATA PENGANTAR

- Pertama-tama Mari Kita panjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat Karunia dan Hidayah-Nya dimana Berkat KemurahanNya BPR Mitra Pandanaran Mandiri masih bisa melayani masyarakat dengan baik dan telah mendapat pencapaian yang cukup baik bagi seluruh elemen perusahaan.
- Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi dokumen strategis yang cukup memadai sebagai sumber informasi bagi segenap stakeholder dalam memberikan gambaran umum tentang kinerja keuangan PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri.
- Kami menyadari bahwa semua yang telah dicapai, belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak, namun kami akan terus berbuat dan berkarya untuk memenuhi harapan tersebut. Dan kami sadar bahwa semua yang telah dicapai ini, merupakan partisipasi dan kerjasama semua pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini kami haturkan terima kasih kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atas semua saran dan bimbingannya, kepada lembaga keuangan lainnya yang telah menjalin kerjasama dengan kami, kepada para pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan kepada para pejabat dan seluruh karyawan atas prestasi dan kerjasamanya dalam upaya ikut mengembangkan PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri

Boyolali, 30 April 2025

Ir. Prihatingtyas





KEPENGURUSAN BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI

DATA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

	Nama	Junaidi Adinata
	Jabatan	Komisaris Utama
	Lahir di Jambi 54 tahun, S2 STEKPI Jurusan Bisnis, menjabat sebagai Komisaris Utama PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri sejak Oktober 2013. Memulai karir di bidang lembaga keuangan sebagai Marketing di Bank Dagang Nasional Indonesia Tahun 1995 - 1997 dan berkarir di Lippo Life sebagai Financial Advisor tahun 1997-1998 Kemudian pernah bekerja di Bank Yudha Bhakti 1998-2013 sebagai Kadiv Perkreditan.	
	Nama	Tatang Sigit Mugiono
	Jabatan	Komisaris
	Lahir di Semarang, 57 tahun, S1 STIE AKA Semarang, menjabat sebagai Komisaris PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri Boyolali sejak Juli 2011. Memulai karir di bidang lembaga keuangan di Bank Yudha Bhakti sejak tahun 1991 sampai dengan Agustus 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Bank Yudha Bhakti Semarang.	



DATA ANGGOTA DIREKSI



Nama Ir. Prihatiningtyas

Jabatan Direktur Utama

Lahir di Klaten, 53 tahun, S1 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Memulai karir di bidang lembaga keuangan di Bank Jateng dari tahun 1994 s/d 1999, dan BPR Jadi Manunggal dari 1999 s/d Juni 2018 . Menjabat sebagai Direktur PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri Boyolali sejak Oktober tahun 2018 dan Direktur Utama Mulai Mei 2022 s/d sekarang.



Nama Wahyudi Usodo

Jabatan Direktur YMF Kepatuhan

Lahir di Boyolali, 50 tahun, DIII Universitas Dian Nuswantoro Semarang , Memulai karir sampai saat ini di BPR Mitra Pandanaran Mandiri sejak tahun 1992 dan menjabat Direktur YMFK dari Mei 2022 s/d sekarang



DATA PEJABAT EKSEKUTIF



Nama Tatriana Haryani

Jabatan PE Audit Internal

Lahir Surakarta 40 tahun DIII ASMI Solo, pernah bekerja di Bank Permata dan masuk BPR Mitra tahun 2004 sebagai Teller dan jabatan terakhir menjadi Audit Internal



Nama Anang Syaiful WB

Jabatan Kabag Marketing

Lahir di Boyolali 40 tahun, S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, masuk pada BPR Mitra Pandanaran Mandiri sejak Juni 2023 dan jabatan terakhir Kabag Marketing.



Nama Nur Choirotun

Jabatan PE Kabag Funding

Lahir di Boyolali 42 tahun, DIII lulusan STIE AUB Surakarta masuk pada BPR Mitra Pandanaran Mandiri sejak 2023 bulan Mei dan jabatan terakhir Kabag Funding



Nama	Eka Listiyani
Jabatan	Kabag Operasional

Lahir Di Boyolali, 29 tahun, S1 lulusan UB Malang, masuk BPR Mitra Pandanaran Mandiri sejak 2018 dan jabatan terakhir Kabag Operasional



Nama	I Wayan eka PU
Jabatan	PE Kepatuhan

Lahir di Tangerang 37 tahun, S1 lulusan Universitas Gajah Mada masuk pada BPR Mitra Pandanaran Mandiri sejak 2022 dan jabatan terakhir PE Kepatuhan



Nama	Wahid Budi Santosa
Jabatan	Kabag Remedial

Lahir Di Sukoharjo, 47 tahun, S1 lulusan STIE Swasta Mandiri Surakarta, masuk BPR Mitra Pandanaran Mandiri sejak 2024 dan jabatan terakhir Kabag Remedial



KEPEMILIKAN SAHAM

	Nama Pemegang Saham	Jumlah	Prosentase
	KOPKAR BANK YUDHA BHAKTI	937.500	62.5%
	Junaidi Adinata	300.000	20%
	I Ketut Suarta	150.000	10%
	KUD Mojosongo	112.500	7.5%
Jumlah		1.500.000	100%

RIWAYAT PENDIRIAN

- BPR Mitra Pandanaran Mandiri berdiri dengan nama BPR Bali Pandanaran Mandiri Tahun 1992 dengan akta no. 314 Tanggal 17 Juli 1992 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta,S.H. yang beralamat di Jl. Tanah Abang II Nomor 48 Jakarta 10160 yang merupakan BPR pola kerjasama antara Bank Bali dan KUD Mandiri yang saat itu KUD yang menjadi mitra Bank Bali adalah KUD Mojosongo, KUD Teras Selatan, KUD Banyudono Selatan, KUD Musuk dan KUD Nogosari.
- BPR Bali Pandanaran Mandiri merupakan salah satu BPR Bali Group dimana jumlah BPR Bali berjumlah 18 BPR yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Saat terjadi banyak Merger Bank di Indonesia dan penggabungan Bank maka Bank Bali berubah nama menjadi Bank Permata maka BPR Bali Pandanaran Mandiri secara otomatis juga menjadi milik Bank Permata ,namun setelah Bank Permata Tbk diakuisisi oleh Standar Chartered Bank maka sesuai aturan yang berlaku bahwa BPR tidak boleh dimiliki oleh asing maka BPR Bali Pandanaran Mandiri dijual.
- Pada tahun 2006 BPR Bali Pandanaran resmi dibeli oleh Kopkar PT. Bank Yudha Bhakti dengan akta Nomor 37 tanggal 01 Desember 2006 yang dibuat oleh notaris Agung Iriantoro, S.H. yang beralamat di Jl. Gading Bukit Indah Blok D16 Kelapa Gading Jakarta Utara dan beralih nama menjadi BPR Mitra Pandanaran Mandiri.
- Saat ini BPR Mitra Pandanaran mandiri sudah mempunyai 3 (tiga) kantor kas yaitu Kas Cepogo, Kas Simo dan Kas Mangu



PENJELASAN NPL

- Pada periode Desember 2024 PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri memiliki NPL sebesar 3.78%, dan berada pada kategori Sehat.
- Terdapat penurunan NPL sebesar 0.3% dari tahun 2023, yang merupakan hasil dari upaya penagihan sehingga terdapat pengurangan baki debit kredit Macet.

PERKEMBANGAN USAHA BPR

a. Kantor Kas

BPR Mitra Pandanaran Mandiri sampai akhir semester II 2024 untuk Kantor kas masih sama dengan semester sebelumnya yaitu 3 kantor Kas di Simo, Mangu dan Cepogo

b. Funding

Kelengkapan SDM funding sudah cukup dengan alokasi di seluruh kantor kas dan kantor pusat dengan target pasar di sekitar Lokasi kantor kas dan baik pasar tradisional maupun nasabah di sekitar Lokasi kantor kas

c. KYD (Kredit Yang Diberikan)

Untuk KYD masih belum bisa meningkat sesuai target yang ditetapkan dengan banyak penyebab tidak bertumbuh dengan maksimal seperti dengan SDM di sisi Bisnis kredit yang masih sangat kurang , namun untuk pemenuhan SDM sudah terus dilakukan dengan recruitment secara promosi di iklan lowongan maupun dalam pencarian dari koneksi karyawan dan pengurus. Selain itu juga pengajuan kredit yang masuk banyak yang tidak layak sehingga banyak yang ditolak

d. Permodalan

Untuk Permodalan pada akhir tahun 2024 masih belum memenuhi target pemenuhan modal inti sebesar 6 M namun dalam penghimpunan laba setiap tahun sudah mengalami peningkatan dari 2023 ke 2024 yang terus meningkat, namun belum bisa mencapai modal inti sesuai yang ditentukan yaitu minimal 6 M. Namun pergerakan peningkatan modal inti terus meningkat, dan juga dengan penyelesaian AYDA sehingga risiko pengurangan modal inti bisa dimitigasi. Dengan belum terpenuhinya modal inti maka pada tahun 2025 oleh pemegang saham pengendali (PSP) akan dilakukan penggabungan / merger antara BPR Mitra Pandanaran Mandiri dan BPR Mitra Gema Mandiri (Purwokerto) untuk pemenuhan Modal inti kedua BPR.

e. Likuiditas

Untuk perkembangan likuiditas sampai dengan akhir semester II 2024 dalam kondisi yang baik dan stabil secara rasio keuangan dalam likuiditas sangat aman seperti Cash Ratio maupun LDR yang masih dalam katagori cukup baik dalam hal risiko likuiditas

f. PPKA

Untuk PPKA selalu dalam kondisi penuh (100%) karena sudah disesuaikan sesuai aturan dalam pemenuhan PPKA, Untuk kredit macet terus mengalami penurunan dan rasio NPL selalu terjaga dibawah 5% sehingga pembentukan PPKA tetap kondusif, penyelesaian kredit bermasalah terus dilakukan baik dengan penagihan rutin sehingga terjadi penurunan baki debit yang mengakibatkan penurunan PPKA karena nasabah sudah membentuk PPKA secara penuh, penurunan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit untuk nasabah yang masih bisa melakukan pembayaran setiap bulannya walaupun terbatas nominalnya sehingga bila 3 bulan angsuran lancar nasabah akan masuk kualitas lancar sehingga nilai PPKA juga akan menurun

g. Asset



Untuk perkembangan asset sudah sesuai target RBB namun memang dalam pertumbuhannya belum sebanding dengan pertumbuhan penyaluran KYD sehingga belum maksimal dalam mendukung penghimpunan laba

h. Biaya Bunga

Untuk biaya bunga simpanan masih berada dibawah dari nilai penjaminan LPS dengan terus meningkatkan penghimpunan dana dari Dana pihak ketiga yang memiliki skema bunga rendah yaitu Tabungan. Untuk dana ABA masih berada pada maksimal bunga LPS dan sebanding dengan dana dari ABP , kondisi ini terus dilakukan penekanan penurunan biaya bunga karena sebagai Langkah efisiensi

i. Efisiensi Biaya

Untuk Efisiensi biaya dilakukan dengan pengaturan pembebanan biaya dengan amortisasi sesuai masa manfaat sehingga tidak ada pembebanan biaya yang terlalu besar setiap bulannya, penggunaan inventaris kantor yang terukur seperti penggunaan AC dan lampu yang dimatikan bila tidak digunakan, penggunaan kertas bekas untuk cetakan internal, pembelian ATK dan inventaris kantor , barang cetakan, tinta printer di instansi atau percetakan yang murah

j. Kualitas Kredit

Kualitas kredit masih baik dengan nilai NPL yang terjaga dibawah 5 % , kualitas kredit terus dilakukan perbaikan dengan penurunan NPL baik dengan penagihan intens, dengan melakukan restrukturisasi untuk nasabah yang masih bisa membayar dan litigasi hukum. Kualitas kredit tidak hanya dalam hal penurunan rasio namun juga dalam penurunan nominal NPL.

k. Rentabilitas

Peningkatan Penghimpunan laba pada akhir semester II 2024 jika dibandingkan dengan RBB belum tercapai namun sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 26.66%.

l. Pelaksanaan Manajemen Risiko dan APU PPT

Pelaksanaan Manajemen Risiko dan APU PPT sudah dilakukan dalam kegiatan operasional harian seperti pada pengkinian aplikasi pembukaan Rekening, pengkinian perjanjian baku, pemberian opini kredit dalam penyaluran KYD oleh Divisi Kepatuhan dan Manrisk, Pelatihan rutin tahunan APU PPT dan Manajemen Risiko . Pelaksanaan Manajemen Risiko dan APU PPT juga termasuk dalam pemantauan dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga masuk dalam laporan pengawasan Dekom minimal setahun sekali

STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN

a. KYD

- Penyaluran KYD tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian / prudential banking karena kredit merupakan nadi dalam bisnis di BPR, kondisi ini mengharuskan BPR melakukan pelaksanaan Manrisk secara menyeluruh dalam aspek pemberian Kredit
- Pemenuhan SDM dalam divisi kredit terus dilakukan agar target tetap tercapai sesuai RBB yang direncanakan, walaupun dalam 2024 belum bisa memenuhi target baik pemenuhan SDM maupun target KYD

b. Penghimpunan Dana

- Penghimpunan dana pihak ketiga dengan skema bunga rendah dilakukan dengan berbagai cara seperti grebeg pasar oleh Tim Funding, pendekatan kelompok organisasi di desa seperti Dawis, Kumpulan RT, paguyuban ojek panggul dsb.
- Penghimpunan dana untuk anak sekolah tidak terbatas dalm sekolah negeri dan swasta namun juga sekolah anak berkebutuhan khusus
- Penghimpunan dana dalam bentuk deposito juga menjaga hubungan baik dengan nasabah prima maupun nasabah eksisting sehingga bisa berkembang lebih luas jaringannya

c. Kualitas Kredit

- Penyelesaian kredit NPL dengan penagihan yang lebih intens dan rutin
- Penyelesaian kredit NPL dengan cara restrukturisasi kredit yang masih mau membayar sehingga nasabah bisa lancar Kembali setelah 3 kali angsuran lancar



- Penyelesaian lewat litigasi hukum seperti Lelang lewat KPKNL, namun untuk 2024 masih belum bisa terlaksana karena adanya perubahan nomenklatur BPR yang sampai dengan saat ini masih dalam pengkinian data

d. Permodalan

- Permodalan pada akhir tahun 2024 belum memenuhi target yaitu pemenuhan Modal inti 6M , kekurangan modal inti ini oleh Pemegang Saham Pengendali di tahun 2025 dilakukan dengan upaya rencana penggabungan 2 BPR yaitu BPR Mitra Pandanaran Mandiri dan BPR Mitra Gema Mandiri (Purwokerto)
- Selama 2024 tidak ada pembagian deviden sehingga penghimpunan laba masuk ke dalam permodalan

e. Manajemen Risiko

- Pelaksanaan Manajemen risiko Kredit dalam kegiatan operasional harian seperti pemberian opini kepatuhan dalam penyaluran kredit dan kunjungan (on the spot) untuk pengajuan kredit dengan plafon tertentu dan kondisi tertentu.
- Pelaksanaan Manajemen Risiko Operasional seperti persetujuan berjenjang sesuai kewenangan dalam kegiatan operasional ,pengeluaran biaya, pengkinian aplikasi bantu untuk pembuatan laporan sehingga meminimalisir kesalahan input
- Pelaksanaan pelatihan baik Kepatuhan, APU PPT, Manajemen Risiko, Kredit dan lainnya baik internal maupun eksternal dengan mengikuti pelatihan dari Perbarindo, Perpajakan maupun yang dilakukan dari OJK sehingga terjadi peningkatan kompetensi karyawan
- Pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas dengan penghimpunan dana murah seperti Tabungan dan deposito, penghargaannya kepada nasabah deposan dengan pemberian parcel, kartu ucapan sehingga menjaga hubungan baik agar dana tetap disimpan di BPR

f. Pengawasan Dekom dan Audit Internal

- Dekom melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan audit internal dan Pengurus dengan meminta data dari BPR sehingga Dekom selalu notice bila terjadi sesuatu yang keluar dari aturan yang berlaku
- Dekom melakukan kunjungan rutin selain kunjungan wajib tahunan dan selalu melakukan koordinasi baik dengan pengurus maupun langsung dengan karyawan dengan memberikan masukan dalam hal integritas dalam pelaksanaan operasional harian
- Dekom juga memberikan masukan dalam hal pelaksanaan RBB yang sudah ditetapkan dengan memberi arahan dalam segala hal yang berhubungan dengan pencapaian RBB
- Peningkatan pengawasan audit internal dengan berkoordinasi dengan Kepatuhan sehingga antara pra dan pasca terjadinya transaksi bisa segera dilakukan perbaikan baik dalam hal aturan yang selalu dikinikan maupun pelaksanaan koreksi transaksi sesuai hasil audit
- Pengawasan Audit dengan system terstruktur berbasis risiko terbukti bisa menjaga kondisi transaksi / kegiatan operasional sehingga dalam tahun 2024 tidak terjadi fraud baik oleh karyawan maupun pengurus
- Pelaksanaan audit menjadi diskusi dalam setiap meeting semua bagian sehingga hasil temuan bisa segera terselesaikan dengan baik dan benar
- Pengawasan audit juga didukung dengan implementasi pembuatan SK Direksi dalam hal kegiatan operasional yang berisiko tinggi dengan melakukan persetujuan berjenjang sehingga setiap transaksi selalu ada opini/masukan dari yang memiliki kewenangan menandatangani didalam form pengajuan transaksi.



PERKEMBANGAN TARGET PASAR

a. Perkembangan

- BPR Mitra Pandanaran Mandiri berdiri sejak 1992 dan pada tahun 2019 menempati Alamat baru di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 10 Madumulyo Pulisen Boyolali
- BPR Mitra Pandanaran Mandiri mempunyai 3 kantor kas yang bertempat di Cepogo, Mangu dan Simo dan pada 2024 tidak ada pembukaan kantor kas/kantor cabang ataupun penutupan kantor kas/kantor cabang
- BPR Mitra Pandanaran Mandiri pada akhir semester II 2024 ini masih berada pada asset yang diatas 30 M dan kredit yang masih 18,7 M sehingga masih bisa dikembangkan dilihat dari kondisi pasar yang ada
- BPR yang ada di Boyolali pada 2024 yang sebelumnya berjumlah 7 (tujuh) sekarang hanya berjumlah 6 (enam) dengan pindahnya BPR Yekti Insan Sembada ke Sragen dan berganti dengan nama menjadi PT BPR Arthareksa Sejahtera, sehingga untuk pasar masih sangat terbuka , sehingga banyak BPR dari luar wilayah yang membuka cabang di Boyolali
- Dalam tiga tahun terakhir penghimpunan laba terus meningkat walau belum maksimal dalam hal pemenuhan permodalan, namun dengan perbaikan setiap tahunnya terlihat kondisi BPR sudah pada arah yang benar

b. Target Pasar

- Target Penyaluran KYD selama ini pasar BPR Mitra Pandanaran Mandiri masih berada pada Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif dengan sektor ekonomi perdagangan , pertanian dan jasa yang mempunyai porsi 3 besar sektor ekonomi
- Target Penghimpunan dana pihak ketiga masih berfokus pada nasabah di sekitar kantor pusat dan kantor kas dengan mengembangkan perluasan area penghimpunan dana dari organisasi-organisasi yang berada di Masyarakat baik paguyuban maupun kelompok Masyarakat yang sering menghimpun dana yang dibagi setahun sekali sehingga sebelum dibagikan bisa disimpan di BPR
- Pasar penghimpunan dari anak sekolah masih bergantung pada Tabungan simpel yang selama ini cukup baik dalam penghimpunan dananya, Target sekolah sudah bervariasi baik sekolah yang formal maupun non formal, baik swasta maupun negeri , baik anak sekolah umum maupun sekolah berkebutuhan khusus
- Penghimpunan dana dengan tambahan NOA menjadi hal yang penting karena dengan bertambahnya NOA akan bertambah juga area penghimpunan dananya.
- Untuk dana ABP BPR Mitra Pandanaran Mandiri tetap kita himpun ,ini dilakukan sebagai penyeimbang dana Dana Pihak Ketiga dan persediaan likuiditas dengan persyaratan dan kesepakatan bisa dikembalikan sewaktu kita kelebihan likuiditas.

TEKNOLOGI INFORMASI

- PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri memakai system operasional (Core Banking System) dari NBP (Nusantara Bona Pasogit) yang beralamat di Jl. Matraman Raya No. 165-167 Gedung Bumiasih Jaya Lt. 5 Jakarta Timur 13140 sesuai Perjanjian Kerjasama Tanggal 28 September 2015
- Aplikasi Core Banking System merupakan aplikasi lengkap dari Customer Service, Teller, Loan Admin s/d Pembukuan
- Untuk Aplikasi tambahan juga disediakan oleh Vendor seperti aplikasi Laporan SLIK, Laporan Bulanan, Laporan OBOX, dsb



- d. Untuk pelaksanaan SAK EP yang akan dilakukan penerapan di tahun 2026 karena BPR Mitra Pandanaran Mandiri mendapat relaksasi pelaksanaan SAK EP sampai dengan Desember 2025 sesuai surat OJK No. S-135/KO.I.301/2025, sedangkan untuk implementasi perhitungan CKPN oleh Vendor (NBP) akan diimplementasikan di bulan Juni 2025 sesuai surat Pernyataan NBP per tanggal 09 Januari 2025 yang melampirkan Persiapan CBS CKPN & SAKEP beserta action plan implementasinya
- e. Petugas IT di PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri sudah dipenuhi per akhir bulan Oktober 2024.

BIDANG USAHA PERBANKAN

Kredit	Tabungan	Deposito
• Modal Kerja • Konsumsi	• Mapan • Unggul • Mandiri • Bersama • Simpel • Qurban	• Jkw 1-12 bulan

PENGEMBANGAN SDM

Kegiatan Pengembangan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta
KegiatanPerhitungan CKPN Training	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Pelatihan Hukum Perdata	Eksternal BPR	Seluruh pegawai
Perjanjian Baku	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif
Governance Risk and Compliance	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Sosialisasi LAPS	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Alat Kerja Risk Control Self assement	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif
Pelatihan Audit Internal BPR	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif
Workshop SAK EP	Eksternal BPR	Seluruh pegawai
Sosialisasi Sertifikat Elektronik	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif
Edukasi Sistem Pembayaran	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif
Aplikasi CKPN NBPSYS	Eksternal BPR	Seluruh pegawai
Pengenalan alat Risk Control	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif
Digitalisasi BPR dan Pelatihan Mikrotik	Eksternal BPR	Seluruh pegawai
Keberlanjutan Fungsi Pejabat Eksekutif	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif
Aplikasi CKPN NBPSYS	Eksternal BPR	Seluruh pegawai
Pelatihan Persiapan Implementasi SAK EP	Eksternal BPR	Seluruh pegawai
Pelatihan APU PPT	Internal BPR	Seluruh pegawai
Pelatihan Garis besar pemahaman Manajemen Risiko	Internal BPR	Seluruh pegawai
Pelatihan Integritas	Internal BPR	Seluruh pegawai



LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA

i. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Nama	PRIHATININGTYAS
Jabatan	Direktur Utama
Tugas dan tanggung jawab: a. Mengaplikasikan penerapan tata kelola yang baik dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairnes. b. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perseroan. c. Berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam hal ini upaya- upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi.	
Nama	Wahyudi Usodo
Jabatan	Direktur YMF Kepatuhan
Tugas dan tanggung jawab: a. Memastikan pelaksanaan prinsip- prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Memastikan kepatuhan BPR terhadap aturan yang berlaku baik dari internal maupun dari otoritas. c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	
Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengaplikasikan penerapan tata kelola yang baik dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairnes. Pelaksanaan tugas direksi dipertanggung jawabkan dalam evaluasi berkala dan saat RUPS maupun RUPSLB	

ii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Nama	Junaidi Aditama
Jabatan	Komisaris Utama
Tugas dan tanggung jawab: Sebagai komisaris utama, melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPR serta pemantauan , memberikan masukan, kunjungan , melakukan rapat konsolidasi, evaluasi berkala dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan	
Nama	Tatang Sigit Mugiono
Jabatan	Komisaris
Tugas dan tanggung jawab: Membantu komisaris utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPR	
Rekomendasi kepada Direksi: Dekom memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham secara berkala dan dalam RUPS / RUPSLB	

iii. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (Jika ada)

Pada periode Desember 2024 PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri memiliki modal inti dibawah Rp 50.000.000.000,- sehingga belum memiliki kewajiban untuk membentuk komite.

iv. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Prihatiningtyas	0	0	0	0
2	Wahyudi Usodo	0	0	0	0

b. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	JUNAIDI ADINATA	300000000	20.00	300000000	20.00
2	TATANG SIGIT MUGIONO		0.00		0.00



v. **Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

a. **Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	PRIHATININGTYAS			0.00
2	WAHYUDI USODO			0.00

b. **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	JUNAIDI ADINATA			
2	TATANG SIGIT MUGIONO	601764	BPR Mitra Agung Mandiri	16.03

vi. **Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

a. **Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PRIHATININGTYAS	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	WAHYUDI USODO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

b. **Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	JUNAIDI ADINATA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	TATANG SIGIT MUGIONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

vii. **Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

a. **Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Prihatiningtyas	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Wahyudi Usodo WAHYUDI USODO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

b. **Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	JUNAIDI ADINATA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	TATANG SIGIT MUGIONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada



viii. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	294000000	2	117600000
2	Tunjangan	2	48600000	2	22200000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total Renumerasi		342600000		139800000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	0	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas Lainnya		0		0
	Total Fasilitas Lainnya		0		0
	Total Renumerasi dan Fasilitas Lain		342600000		139800000

ix. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.8
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.3
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.4
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.75

x. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20 Maret 2024	2	Evaluasi RBB Triwulan I, Manajemen Risiko, Action Plan RBb s/d Maret 2024
2	29 April 2024	2	RBB Triwulan II dan Evaluasi RBB Triwulan I
3	15 Juli 2024	2	Manajemen Risiko, APU PPT dan Tata kelola
4	05 Desember 2024	4	Pembahasan dan Pengesahan RBB

xi. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekwensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	JUNAIDI ADINATA	4	0	100
2	TATANG SIGIT MUGIONO	15	0	100



xii. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

xiii. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Selama tahun 2024 tidak terdapat kasus hukum yang dihadapi

xiv. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

xv. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	18 Januari 2024	01 (Kegiatan Sosial)	Baksos PPDI	PPDI	50.000
2	31 Oktober 2024	01 (Kegiatan Sosial)	Beasiswa Taber	Siswa SD	1.500.000
3	06 Agustus 2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sponsor Kegiatan Agustusan	Rukun Warga Pulisen, Simo	1.100.000
4	28 Mei 2024	01 (Kegiatan Sosial)	Iuran Rt	Rukun Tetangga Madumulyo	450.000
5	08 Mei 2024	01 (Kegiatan Sosial)	Takziah tetangga Kantor pusat (Madumulyo)	Warga Madumulyo	139.000
6	20 Februari 2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bakti sosial Penghijauan	HimaPol	400.000



KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penjelasan Umum	Peringkat Komposit	Penjelasan Peringkat Komposit
Struktur organisasi PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri masih baik, diharapkan penerapan tata kelola di BPR Mitra Pandanaran Mandiri dapat terpantau dengan baik dan sesuai ketentuan. Terjaganya kondisi BMPK memberikan dampak positif bagi BPR Mitra Pandanaran Mandiri, dan diharapkan kondisi ini dapat terjaga dengan baik. BPR Mitra Pandanaran Mandiri diharapkan terus menunjukkan transparansi keuangan maupun non keuangan sebagai acuan para stakeholder dan menjaga kepercayaan dari semua pihak, adapun prinsip yang harus dijaga seperti: 1. Transparansi : keterbukaan dalam pengelolaan dan pengungkapan informasi 2. Akuntabilitas : Pertanggungjawaban dalam pengelolaan BPR 3. Kepatuhan :Mematuhi peraturan dan standar OJK 4. Kemandirian : Menghindari konflik kepentingan 5. Kesadaran resiko : Mengidentifikasi dan mengelola resiko	2 (Baik)	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan struktur organisasi yang lengkap, tidak terdapat pelampauan ataupun pelanggaran BMPK serta penyampaian laporan keuangan BPR dengan berdasarkan prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

LAPORAN OPINI AUDIT KAP

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
(02) Wajar dengan Pengecualian	Bambang, Sutjipto Ngumar



Nomor: 00062/3.0461/AU.2/07/1321-1/1/IV/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth;
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI** terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BPR berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan **PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI** untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh auditor independen lain dalam laporannya nomor: 00032/3.0402/AU.2/07/1391-1/1/IV/2024 yang diterbitkan pada tanggal 17 April 2024 dengan opini wajar dengan pengecualian.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPR dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPR.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal BPR.



- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BPR untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BPR tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan



Dr. Kurnia, Ak, CA., CPA

Izin Akuntan Publik No. AP. 1321

Bandung, 28 April 2025



MANAGEMENT LETTER
HASIL AUDIT LAPORAN KEUANGAN

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MITRA PANDANARAN MANDIRI**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024



No. : 00062A/ML/KAP.BSN/IV/2025
Hal : Management Letter Audit Laporan Keuangan
Tahun 2024

Kepada Yth :

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 10
Kabupaten Boyolali

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri (yang selanjutnya disebut BPR) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kami melakukan pemahaman atas struktur pengendalian intern dan penilaian pelaksanaan operasi PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri. Struktur pengendalian intern, kewajaran pembukuan, penilaian dan pelaksanaan operasi BPR tersebut merupakan tanggung jawab manajemen BPR.

Management Letter memperhatikan 4 aspek sebagai berikut:

1. Kepatuhan Bank Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2. Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern
3. Hal - Hal yang perlu diungkap selain yang disebut dalam butir 1) dan 2)
4. Upaya BPR dalam meningkatkan kinerja di tahun 2024

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemegang kepentingan baik intern maupun ekstern, dan untuk digunakan dalam rangka perbaikan oleh Manajemen BPR.

Seandainya ada hal - hal yang memerlukan penjelasan yang lebih lanjut, kami bersedia untuk mendiskusikan hal tersebut. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada manajemen dan seluruh staff PT BPR Mitra Pandanaran Mandiri yang telah memberikan bantuan dan kerjasama selama pelaksanaan audit.



Dr. Kurnia, Ak., CA., CPA
N.R.A.P : AP. 1321

Bandung, 28 April 2025

Selama audit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang kami lakukan, terdapat hal-hal sebagai berikut :

1. LAPORAN KEUANGAN BPR

Laporan keuangan BPR per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- Neraca per 31 Desember 2024 menurut Bank sebesar Rp.30.295.995.830,- sedangkan menurut audit sebesar Rp.30.143.000.065,-.
- Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 menurut Bank sebesar Rp.630.274.614,- sedangkan menurut audit sebesar Rp.559.544.995,-.
- Jurnal koreksi dan/ reklasifikasi sebesar Rp.238.403.501,- . (lihat *Lampiran 1*).

Bank terjadi **penurunan** perolehan Laba Bersih Setelah Pajak sebesar **Rp.70.729.619,-** dikarenakan adanya jurnal koreksi atas amortisasi biaya dibayar dimuka.

2. KOLEKTIBILITAS DALAM PERHATIAIN KHUSUS YANG TINGGI

Kondisi :

Bank memiliki Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 2) dalam 3 (tiga) tahun yang tinggi.

Kriteria :

Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) sebaiknya tidak lebih atau sama dengan 5%.

Akibat :

Bank mempunyai jumlah Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) dalam 3 (tiga) tahun yang tinggi dan dapat menyebabkan akan naiknya *Non Performing Loan* (NPL) jika tidak diusahakan untuk penagihan. Rincian atas Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) sebagai berikut :

Kolektibilitas	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2021
- Lancar	15.067.159.020	14.782.379.877	11.120.762.238
- Dalam Perhatian Khusus	3.144.992.345	2.947.215.371	2.819.988.876
- Kurang Lancar	294.197.627	191.030.122	144.161.722
- Diragukan	49.626.737	42.194.634	125.000.000
- Macet	371.139.580	520.748.679	696.007.154
Jumlah Kredit Dalam Perhatian Khusus	3.144.992.345	2.947.215.371	2.819.988.876
Jumlah Kredit yang Diberikan	18.927.115.309	18.483.568.683	14.905.919.991
Prosentase Kredit Dalam Perhatian Khusus	16,62%	15,95%	18,92%

Saran :

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen dapat melakukan penagihan atas Debitur yang mempunyai Kolektibilitas Kredit Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) agar prosentase terhadap Kredit *Non Performing Loan* (NPL) dapat terjaga.

Tanggapan :

Bank telah dan akan terus melakukan upaya-upaya penagihan atas Debitur yang mempunyai Kolektibilitas Kredit Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) dengan melakukan penagihan rutin dan intens, penyampaian Surat Peringatan secara konsisten, restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan membayar. Debitur-debitur yang benar-benar tidak mampu lagi melakukan pembayaran dan akan menjadi bermasalah (masuk NPL). Bank melakukan pendekatan kepada debitur untuk melakukan penjualan jaminan bersama-sama guna penyelesaian kredit. Bagi debitur-debitur yang tidak kooperatif Bank melakukan pemasangan papan pengawasan di tempat jaminan, dan debitur biasanya akan mengupayakan pembayaran atau meminta untuk dilakukan restrukturisasi sesuai kemampuan bayar mereka. Guna memotivasi petugas penagihan manajemen memberikan insentif dalam penanganan kredit DPK, bagi yang berhasil melakukan pembinaan debitur dan ada perbaikan PAR minimal 2 tunggakan.

3. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

Kondisi :

Bank memiliki Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) per 31 Desember 2024 lebih dari 3 (tiga) tahun yaitu sebesar **Rp.270.000.000,-**.

Kriteria :

Agunan yang diambil alih berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. BPR dapat mengambil alih agunan untuk penyelesaian Kredit yang memiliki kualitas macet.
2. Pengambilalihan agunan tersebut bersifat sementara.
3. Pengambilalihan agunan tersebut harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada Debitur.
4. BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan nilai realisasi bersih.
5. Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan :
 - a. untuk AYDA dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPR; dan
 - b. untuk AYDA dengan nilai lebih dari Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) wajib dilakukan oleh penilai independen.
6. Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap setiap agunan.
7. BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian; dan
 - b. dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

Perubahan atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* tanggal 26 Mei 2020 pada Bab III Agunan Yang Diambil Alih Pasal 4, sebagai berikut :

1. BPR atau BPRS menghitung persentase nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR dan BPRS.
2. Perhitungan persentase dari nilai agunan yang diambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan posisi laporan bulan Maret 2020.

Akibat :

Agunan Yang Diambil Alih yang dimiliki dan tidak segera untuk dijual maka Bank akan mengalami penurunan modal inti yang dimiliki oleh Bank.

Saran :

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen dapat segera untuk menjual Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) agar tidak mengurangi modal inti yang telah dimiliki Bank.

Tanggapan :

Bank telah dan akan terus melakukan upaya penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) terbukti pada tahun 2023 dapat menjual 1 AYDA dan tahun 2024 dapat menjual 1 AYDA. dan pada akhir tahun 2024 AYDA masih tersisa 1. Bank juga terus berupaya melakukan penawaran melalui media koran, medsos, door to door di masyarakat sekitar lokasi AYDA. Beberapa penawaran yang masuk selalu jauh dibawah nilai AYDA karena memang dari awal nilai jaminan tersebut jauh dibawah nilai kredit yang pernah diberikan, dibuktikan Bank telah melakukan appraisal ulang oleh lembaga penilaian agunan indeoenden yang terbukti nilai taksasinya dibawah nilai AYDA. Pada awal tahun 2025 telah ada penawaran yang cukup serius dari masyarakat sekitar yang kebetulan posisi masih merantau di Surabaya, diharapkan penawaran yang terakhir ini akan serius akan membeli AYDA yang masih tersisa sehingga AYDA tersisa ini bisa terjual dan tidak lagi menjadi pengurang modal inti Bank.

4. PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM

Kondisi :

Bank wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) paling lambat pada tanggal **31 Desember 2024**.

Kriteria :

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat pada Bab III Pasal 13, bahwa Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar **Rp.6.000.000.000,-** (Enam Miliar Rupiah) dengan ketentuan:

1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) paling lambat pada tanggal **31 Desember 2019**.
2. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti minimum sebesar **Rp.6.000.000.000,-** (Enam Miliar Rupiah) paling lambat pada tanggal **31 Desember 2024**.
3. BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) namun kurang dari Rp.6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah), wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Akibat :

Pada saat dilakukan pemeriksaan per 31 Desember 2022, BPR memiliki modal inti minimum sebesar kurang dari **Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah)** sehingga harus melaksanakan Peraturan tersebut diatas pada ayat (2) dan wajib memenuhi modal inti minimum sebesar **Rp.6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah)** paling lambat pada tanggal **31 Desember 2024**.

Saran :

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk wajib memenuhi modal inti minimum sebesar **Rp.6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah)** dengan cara penyetoran modal atau melakukan merger.

Tanggapan :

Sesuai surat dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam memenuhi POJK No.7 tahun 2024 dan guna memenuhi Modal Inti Minimum sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) Bank akan melakukan merger dengan BPR Mitra Group se Pulau Jawa secara bertahap (3 tahap). Pada tahap 1 akan dilakukan merger 2 BPR yaitu PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri, Boyolali dan PT. BPR Mitra Gema Mandiri, Purwokerto yang saat ini telah berproses dengan mengirim Rencana Tindak Merger ke OJK. Untuk PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri sendiri selama 3 tahun terakhir telah menunjukkan adanya peningkatan penghimpunan modal inti dari pemupukan laba Bank yang meski perlahan meningkat dari tahun ke tahun.

5. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN)

Kondisi :

BPR melalui vendor *Core Banking System* (CBS) masih belum siap terhadap pemberlakuan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025..

Kriteria :

BPR wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai standar akuntansi keuangan. Perhitungan rasio KPMM, BPR wajib memperhitungkan CKPN yang dibentuk dan PPKA atas Aset Produktif.

Hasil perhitungan CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA atas Aset Produktif, BPR wajib memperhitungkan selisih perhitungan CKPN yang dibentuk dengan PPKA atas Aset Produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. Hasil perhitungan CKPN yang dibentuk sama dengan atau lebih besar dari PPKA atas Aset Produktif, BPR tidak perlu memperhitungkan PPKA atas Aset Produktif dalam perhitungan rasio KPMM.

5. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN) (Lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perkeonomian Rakyat dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Akibat :

Bank masih mencoba melakukan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai standar akuntansi keuangan dengan cara manual.

Saran :

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen menghubungi vendor penyelenggara *Core Banking System* (CBS) untuk dapat mempersiapkan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025..

Tanggapan :

Bank telah berkoordinasi dengan Vendor penyelenggara Core Banking System (CBS) untuk melakukan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan vendor telah menanggapi permintaan bank dan terkait komitmennya vendor juga telah melakukan pembuatan sistem CKPN dan sesuai komitmennya Vendor akan melakukan implementasi ke CBS pada bulan Juni 2025 dan komitmen tersebut telah dikirim ke OJK juga. Oleh OJK BPR Mitra Pandanaran Mandiri diberikan relaksasi pelaksanaan pemberlakuan CKPN sampai akhir tahun 2025 terkait kesiapan sistem oleh vendor dan terkait proses merger yang baru berjalan.

6. KREDIT YANG DIBERIKAN

Pemeriksaan ke lapangan (*On The Spot*) yang kami laksanakan dengan data yang digunakan per 31 Oktober 2024 terhadap debitur-debitur Bank dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- a. Debitur atas nama **MUH NANDIR**, No. Kredit **0110101410103651**, plafond sebesar Rp.200.000.000,- baki debit per 30 September 2024 sebesar Rp.200.000.000,- dan No. Kredit 0110101410103357, plafond sebesar Rp.200.000.000,- baki debit per 30 September 2024 sebesar Rp.200.000.000,-, agunan yang digunakan adalah SHM dan BPKB milik debitur. Informasi yang kami dapatkan ketika kami melakukan kunjungan ke debitur bahwa fasilitas kredit digunakan sebagai modal kerja usaha sewa dan jual beli alat berat yang telah diintis kurang lebih dari tahun 2016. Debitur juga memiliki usaha sampingan sebagai kontraktor di wilayah Boyolali. Informasi lain bahwa debitur mengalami keterlambatan pembayaran cicilan dikarenakan pendapatan dari usaha debitur sedang mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya orang yang memantau bisnis sewa dan jual beli alat berat milik debitur. Saat ini debitur termasuk golongan **Kolektibilitas Lancar (Kolektibilitas 1)**.
- b. Debitur atas nama **SLAMET PUJIYANTO**, No. Kredit **0110101410103194**, plafond sebesar Rp.75.000.000,- baki debit per 30 September 2024 sebesar Rp.27.982.300,-, agunan yang digunakan adalah SHM atas nama Nur Afni. Informasi yang kami dapatkan ketika kami melakukan kunjungan ke debitur bahwa fasilitas kredit digunakan saudara debitur untuk membuka usaha, namun angsuran dari saudara debitur terhenti ketika adanya Pandemi Covid-19 dan selanjutnya angsuran tersebut dilanjutkan oleh debitur. Debitur pada saat ini berprofesi sebagai wirausaha yang memiliki 5 karyawan. Saat ini debitur termasuk golongan **Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)**.
- c. Debitur atas nama **ISNANTO**, No. Kredit **0110101410102659**, plafond sebesar Rp.150.000.000,- baki debit per 30 September 2024 sebesar Rp.70.243.300,-, agunan yang digunakan adalah SHM atas nama paman debitur. Informasi yang kami dapatkan ketika kami melakukan kunjungan ke debitur bahwa debitur saat ini memiliki usaha dagang material dengan pendapatan kotor sebesar Rp.7-10 Juta/ Bulan. Dana pinjaman dari bank digunakan untuk membeli truck untuk modal usaha dagang material. Debitur mengkonfirmasi bahwa debitur pernah mengalami kendala pembayaran angsuran berupa servis rutin unit kendaraan. Saat ini debitur termasuk dalam golongan **Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)**.

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

- d. Debitur atas nama **SUPRAPTO**, No. Kredit **0110101410092392**, plafond Rp.300.000.000,- baki debet per 30 September 2024 sebesar Rp.15.000.000,-, agunan yang digunakan adalah BPKB Mobil Jazz atas nama orang lain. Informasi yang kami dapatkan ketika kami melakukan kunjungan ke debitur bahwa debitur saat ini memiliki usaha petani tembakau dengan pendapatan kurang lebih sebesar Rp.50 Juta/ Bulan. Dana pinjaman dari Bank digunakan untuk modal usaha petani tembakau. Debitur mengkonfirmasi bahwa debitur pernah mengalami kendala pembayaran angsuran berupa ruginya hasil penjualan tembakau. Debitur sebelumnya pernah melakukan penjualan agunan debitur bersama dengan pihak Bank (manajemen lama) yang menyebabkan debitur merasa sudah tidak memiliki pinjaman di BPR terkait. Saat ini debitur termasuk dalam golongan **Kolektibilitas Macet (Kolektibilitas 5)**.

Saran :

- Apabila Direksi atau surveyer kurang yakin dalam analisisnya untuk memberikan dana kepada debitur sebaiknya jangan ragu untuk menolaknya jangan hanya mementingkan target yang harus dicapai perusahaan tetapi mempunyai risiko besar.
- Pihak Bank untuk memberikan kredit pada nasabah harus menganalisa sebaik mungkin penghasilan dari debitur atau kemampuan debitur, jangan hanya melihat jaminan/ agunan.
- Penetapan jenis angsuran/ jenis pembayaran (menggunakan sistem **angsuran/ installment** atau sistem **bayar bunga demand loan**) akan berpengaruh terhadap jenis usaha serta kemampuan aliran kas yang dimiliki oleh Debitur.
- Pihak Bank sebaiknya melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha Debitur agar dapat dengan segera mengetahui jika terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Debitur sehingga dapat mengganggu arus kas untuk membayar angsuran Bank.

Tanggapan :

Terkait proses pemberian kredit, dalam pembuatan analisa dilakukan dengan diskusi dalam Komite Kredit oleh AO (bagian Kredit), Kabag Kredit dan Kepatuhan serta PE Manrisk untuk memberikan opini dan saran guna memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kredit terkait Plafond kredit, besar angsuran serta skema kredit. Selanjutnya Bank akan lebih cermat dalam melakukan analisa dan mitigasi resiko kredit yang diharapkan resiko kredit bisa dikendalikan dengan baik. Kredit terdampak covid yang saat ini masih ada dan sudah dilakukan restrukturisasi terus dilakukan evaluasi serta assesment sehingga akan diambil langkah apakah mengarah ke penyelesaian maupun ke penyelamatan dengan restrukturisasi dengan skema yang tepat.

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MITRA PANDANARAN MANDIRI
JURNAL PENYESUAIAN
Per 31 Desember 2024

NO	KETERANGAN	COA	DEBET	KREDIT
1	Beban Non Operasional - Beban Kerugian Penjualan AYDA Aset Lain-lain - Biaya Dibayar Dimuka - AYDA (Untuk mencatat jurnal koreksi atas aset lain-lain - biaya dibayar dimuka AYDA yang telah laku terjual)	680200 125209	19.611.809	19.611.809
2	Utang Pajak - PPh Pasal 29 - Badan Kewajiban Lain-lain - Taksiran Pajak Beban Pajak Penghasilan Utang Pajak Penghasilan - PPh Pasal 29 Badan Aset Lain-lain - Pajak Dibayar Dimuka - PPh Pasal 25 (Untuk mencatat jurnal eliminasi atas pajak dibayar dimuka - PPh pasal 25 dan jurnal koreksi atas kekurangan perhitungan beban pajak penghasilan tahun 2018)	Baru 243120 Baru Baru 125101	76.000.000 85.407.736 1.313.506	86.721.242 76.000.000
3	Beban Pemasaran - Beban Iklan/ Promosi Beban Umum dan Administrasi - Beban Fee OJK Beban Non Operasional - Beban Lain OJK Aset Lain-lain - Biaya Dibayar Dimuka - Personalia (Untuk mencatat jurnal koreksi atas aset lain-lain - biaya dibayar dimuka personalia)	640100 668330 680800 125208	50.164.200 - - -	50.164.200

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MITRA PANDANARAN MANDIRI
NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31-12-2024	31-12-2023
ASET			
Kas	5	158,371,400	214,429,900
Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima	4o, 6	284,900,914	300,557,869
Penempatan pada Bank Lain	4b, 4d, 7	10,152,129,554	8,680,069,412
Kredit yang Diberikan	4c, 4d, 4f, 4o, 8	18,751,964,408	18,321,105,601
Penyisihan Kerugian Kredit yang Diberikan -/-		(226,755,378)	(270,265,051)
Agunan yang Diambil Alih	4g, 9	270,000,000	493,655,425
Aset Tetap dan Inventaris	4h, 4r, 10	869,714,488	721,059,488
Akumulasi Penyusutan -/-		(698,112,204)	(632,128,967)
Aset Tidak Berwujud	4i, 4r, 11	6,073,959	14,703,127
Aset Lain-lain	4j, 12	581,932,680	776,870,738
JUMLAH ASET		30,150,219,821	28,620,057,542
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	13	19,525,871	30,662,905
Utang Bunga	4k, 14	119,231,691	102,113,353
Utang Pajak	4s, 15a	10,721,242	18,485,860
Simpanan :	4l, 4m, 16		
- Tabungan		8,740,710,331	7,534,866,977
- Deposito		10,126,798,739	10,398,604,458
Simpanan dari Bank Lain	4l, 4m, 17	5,750,000,000	5,750,000,000
Kewajiban Lain-lain	18	107,178,563	68,455,703
Jumlah Kewajiban		24,874,166,437	23,903,189,256
EKUITAS			
Modal Disetor	19	1,500,000,000	1,500,000,000
Saldo Laba :	20		
- Cadangan Umum		300,000,000	300,000,000
- Belum Ditentukan Tujuannya		3,476,053,385	2,916,868,286
Jumlah Ekuitas		5,276,053,385	4,716,868,286
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		30,150,219,821	28,620,057,542

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


Ir. Prihatiningtyas
Direktur Utama


Wahyudi Usodo
Direktur

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MITRA PANDANARAN MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun 2024	Tahun 2023
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	4o, 21	4,929,041,222	4,299,878,868
Beban Bunga	4o, 22	(1,219,833,659)	(1,106,231,001)
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih		3,709,207,563	3,193,647,867
Pendapatan Operasional Lainnya	23	294,248,528	232,614,175
Jumlah Pendapatan Operasional		4,003,456,092	3,426,262,043
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	4c, 4d, 24	59,340,556	66,579,546
Beban Pemasaran	25	91,926,100	94,871,288
Beban Umum dan Administrasi	26	3,144,687,337	2,803,045,962
Beban Lainnya	27	35,017,933	29,889,593
Jumlah Beban Operasional		3,330,971,926	2,994,386,389
LABA (RUGI) OPERASIONAL		672,484,166	431,875,654
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	28	21,960,000	85,176,500
Beban Non Operasional	29	(48,537,825)	(10,069,500)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		(26,577,825)	75,107,000
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		645,906,341	506,982,654
Beban Pajak Penghasilan :	4s, 15b	(86,721,242)	(65,485,860)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		559,185,099	441,496,794

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Ir. Prihatiningtyas
Direktur Utama

Wahyudi Usodo
Direktur